

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DADAKAN
(DIGITALISASI PELAPORAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan SAKIP adalah pengumpulan data dan dokumen. Setiap pemerintah daerah harus mampu meningkatkan hasil kerja melalui inovasi dengan prinsip transformasi digital. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuk satu yaitu inovasi DADAKAN (Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja) untuk mempermudah tata kelola pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja guna mempercepat transformasi digital di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Permasalahan yang menjadi dasar perlunya inovasi DADAKAN ini dibagi menjadi dua yaitu secara makro dan mikro. Secara makro, instansi pemerintah masih dibebani oleh tingginya beban administrasi akibat proses pelaporan dokumen yang bersifat manual, repetitif, dan belum terdigitalisasi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penumpukan fotokopi dokumen, pemborosan waktu, penggunaan kertas yang berlebihan, serta berpotensi menurunkan kualitas dokumen yang dilaporkan karena tidak efisiennya sistem pengarsipan dan pemrosesan data. Sementara itu secara mikro, proses manual cenderung rawan terhadap kesalahan manusia (human error), seperti ketidaktepatan dokumen dan keterlambatan pelaporan dokumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu inovasi berbasis digital yang mampu mengatasi permasalahan tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam penguatan akuntabilitas kinerja serta permasalahan sebelumnya, muncul isu strategis mencakup beberapa aspek penting yaitu digitalisasi sistem pelaporan dan efisiensi dalam proses kerja. Digitalisasi sistem pelaporan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem kerja yang lebih mudah, cepat, dan akurat. Sementara efisiensi proses kerja diperlukan untuk mengurangi beban administrasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi DADAKAN dimaksudkan sebagai sistem pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Adapun tujuan inovasi DADAKAN adalah:

1. Terciptanya transformasi digital tata kelola pemerintahan pada sistem pelaporan data produksi;
2. Terciptanya sistem pelaporan data produksi yang efisien, cepat, mudah, dan akuntabel;
3. Terciptanya *good governance* dalam lingkungan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi DADAKAN sebagai berikut.

1. Persiapan

Admin memuat struktur folder yang sistematis di Google Drive sebagai tempat unggahan dokumen dokumen akuntabilitas kinerja seperti LkjIP, Renja, DPA, dan Evaluasi Kegiatan per Bidang. Folder kemudian dibuatkan tautan agar bisa diakses melalui *smartphone* atau komputer oleh petugas.

2. Pengelolaan

Admin meyetel pengaturan hak akses meliputi:

- Admin: Dapat mengelola semua dokumen.
- Petugas: Dapat mengedit dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan.
- Unit Kerja: Dapat melihat dan mengunduh dokumen sesuai kebutuhan.

3. Pengunggahan Dokumen

Petugas mengonversi dokumen fisik ke digital (scan dalam format PDF) kemudian mengunggah dokumen ke tautan yang disediakan.

4. Pemantauan

Admin memverifikasi dokumen yang telah diunggah petugas untuk memantau kelengkapan dokumen.

V. KEAMANAN DAN PENCADANGAN

- Pengaturan hak akses secara berkala untuk menghindari penyalahgunaan.
- Aktivasi autentikasi dua faktor untuk melindungi akun.
- Dilakukan pengunduhan salinan berkala ke penyimpanan lokal/eksternal sebagai cadangan.

VI. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi DADAKAN ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Pt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan Kota Pariaman



ANITA, SE
NIP. 19660415 199303 2 006